**Terorisme di Era Konvergensi**

A Zahid1 dan Ahmad Naufel2

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri1, dan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta2

[**azahidwaris19@gmail.com**](mailto:azahidwaris19@gmail.com)

**Abstract**

This article discusses about the relationship between media and terorism in convergence era. The object was terorism news in TV One. Broadcasting of terorism through media in convergence era demanded to hold tightly of ethical principles of journalism. If not, the media would be a tool spreading terror out to society. This study was a qualitative research using descriptive method because this research aimed to get answer related to perception and opinion thereby requiring detailed quali. Data analysis was carried out using Miles and Huberman’s approach, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validation was conducted using source triangulation to recheck the obtained data.

Keyword: *Terorism, TV One, Media Convergence*

**PENDAHULUAN**

Terorisme adalah gejala anomalik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terdapat beregam faktor yang menjadi pemicu lahirnya terorisme. Sejumlah peneliti pun tidak pernah berhenti untuk mencari latar belakang di balik terorisme. Mereka akhirnya membuat sejumlah asumsi bahwa terorisme lahir sebab faktor ekonomi, politik, dan ideologi. Terorisme sebagai objek kajian ilmiah, telah malahirkan wacana dan karya ilmiah yang mendalam. Bahkan, paneliti banyak yang mengambil tema terorisme hingga mampu merumuskan beragam teori baru terkait dengan tema yang dimaksud. Dengan demikian, isu mengenai terorisme merupakan suatu objek kajian yang manarik diteliti dengan menggunakan beragam perspektif.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, isu mengenai terorisme menjadi semakin kompleks. Kelompok teroris melakukan adaptasi dan memanfatkan perkembangan tersebut sebagai sarana untuk melncarkan aksinya. Di samping itu, terorisme belakagan menjadi isu yang begitu bombastis berkat adanya peran media. Namun, sebelum jauh memasuki hubungan dan keterjalinan antara media dan terorisme, kita terlebih dahulu perlu untuk memahami arti kata terorisme. Dari situlah kemudian kita akan memahami lebih jauh mengenai terorisme, yang bukan sekadar aksi destruktif, melainkan terdapat kepentingan secara implisit atau bahkan secara eksplisit yang menyertainya.

Bagi kita kata terorisme, mungkin bagi kita sudah terdengar seperti hal yang biasa. Meskipun memang istilah tersebut terkesan hiperbolis, apabila dilihat dalam konteks intensitas penggunaannya di Indonesia. Terorisme adalah suatu problem yang sangat kompleks. Ia bukan hanya sekadar aksi destruktif dengan mengorbankan diri pelaku atau orang lain. Lebih dari itu, di balik terorisme tersimpan suatu kepentingan politik dan beragam motif yang tidak bisa kita nafikan.

Dengan demikian, kata terorisme sulit didefenisikan, mengingat hal itu penuh dengan kepentingan politik dan gejolak emosional. Dalam konteks historisnya, menurut Kacung Marijan, kata terorisme disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang muncul pertama kali pada tahun 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise* (Marijan, 2003). Dalam konteks tersebut, terorisme memiliki keterjalinan dengan Revolusi Prancis, sehingga kata terror sendiri berkonotasi positif sebagai bentuk tindakan untuk menjungkalkan rezim. Sementara dalam perjalanan historisnya, menurut Jainuri, istilah terorisme mulai popular di dalam ilmu social pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an sebagai bentuk kekerasan dan tindakan brutal yang disebabkan oleh agama (Jainuri, 2006).

Terorisme menjadi isu global tatkala terjadi peristiwa 9 September 2001 saat gedung World Trade Center di New York Amerika Serikat diserang dan dihancurkan oleh sekelompok orang yang ditengarai sebagai anggota Al-Qaeda. Dalam sejarahnya, sebenarnya terorisme telah muncul sejak beberapa abad silam. Pada mulanya, yang disebut dengan terorisme hanya sekadar kejahatan seperti pembunuhan dengan orientasi tertentu. Seiring dengan perkembangannya, terorisme kemudian lahir dari pemahaman sempit terhadap doktrin agama yang berujung pada pembunuhan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman. Tetapi, meski demikian, secara komprehensif terorisme tidak sekadar terfokus pada motif yang demikian. Karena hal itu merupakan bentuk simplifikasi dari arti kata terorisme sendiri.

Jika merunut pada akar sejarah kontemporer, aksi terorisme sebenarnya terjadi sebelum Perang Dunia 2, seperti pembuhuhan terhadap para pejabat pemerintah yang memiliki pengaruh yang cukup vital di suatu negara. Pada tahun 1950-an, di Aljazair terjadi aksi terorisme yang dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan istilah “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Sementara pada tahun 60-an muncul istilah “terorisme media”, ialah serangan teror terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

Osama Bin Laden adalah ikon teror pada era 90-an dengan membentuk Al-Qaedah yang memiliki jaringan transnasional, di mana anggota terdiri dari berbagai bangsa dan negara. Dengan didasari kebencian pada Amerika Serikat ia menggunakan doktrin agama sebagai alat untuk melegitimasi setiap tindakan brutal dan ekstrem yang dilakukan oleh anggota Al-Qaedah. Tragedi 11 September 2001 termasuk cara yang dilakukan oleh Osama untuk menancapkan dominasi, menebar kengerian dan mengoyahkan hegemoni Amerika Serikat.

Kendati demikian, menurut Victor Silaen (2005: 38) para pelaku teror sejatinya berkeinginan agar aksi mereka menjadi “tontonan global” dan dilihat oleh berjuta-juta orang di berbagai penjuru dunia. Semakin banyak yang menonton, maka semakin masif juga efek negatif yang ditimbulkannya. Apabila tujuan tersebut tercapai, “kuntungan politik” akan didapat oleh mereka para pelaku aksi teror (Kompas, 21-10-2002). Artinya aksi teror 11 September 2001 merupakan salah satu usaha teroristik yang dilakukan oleh Al-Qaeda untuk mendapat sorotan global.

Di Indonesia, perkembangan terorisme sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari jaringan terorisme transnasional seperti Al-Qaeda. Jamaah Islamiah (JI) sendiri sebagai gembong gerakan terorisme di Asia Tenggara memiliki afiliasi dengan Al-Qaedah. Kelompok teror ini menjadi terkenal seiring dengan berbagai aksi yang dilakukan mereka, salah satunya ialah ledakan bom dengan daya eksplosif di tempat wisata di Legian Bali pada 2002, disusul dengan ledakan bom di Hotel JW Marrion pada 5 Agustus 2003, dan pada 9 September 2004 di depan Kedutaan Besar Australiam Kuningan, Jakarta.

Seiring dengan terbunuhnya Osama bin Laden dan munculnya Islamic State of Iraq and Syiriah (ISI), Al-Qaedah akhirnya membangun hubungan dengan ISIS. Sedangkan, di Indonesia, Jamaah Islamiah tidak lagi intens melakukan aksi terorisme. Meskipun demikian, bukan berarti terorisme hilang sama sekali. Aksi-aksi terorisme kini kerap dilancarkan oleh para simpatisan ISIS yang berada di Indonesia. Berbagai rentetan aksi teror pun dilancarkan oleh mereka, misalnya pada 2016 terjadi bom Thamrin, aksi bunuh diri di Mapolresta Surakarta, dan bom bunuh diri di Kampung Melayu pada 2017. Dengan mengacu pada orientasi Al-Qaedah seperti yang disebut di atas bahwa pada hakikatnya mereka melakukan aksi teror agar bisa disaksikan oleh jutaan masyarakat global. Ini artinya, secara tidak langsung keterlibatan media dalam terorisme menjadi sesuatu yang sangat signifikan.

Dengan melihat realitas yang demikian, pemerintah sejak semula talah menyatakan sikap untuk menumpas pelaku teror. Namun, persoalannya menurut Prajarto (2004: 1) terorisme memiliki titik perbedaan dengan perang konvensional di mana lawan dan musuh yang dihadapi jelas dan kongkret. Melawan terorisme tak ubahnya sedang berperang melawan gerilyawan dengan musuh dan taktik yang tidak jelas (Prajarto, 2004: 1). Keduanya tentu memiliki titik perbedaan yang bisa diurai secara panjang lebar.

Sebagai respon atas aksi-aksi teror, pemerintah melakukan segala upaya untuk melawan dan menghentikannya. Salah satu upaya melawan terror ialah dengan memanfaatkan peran dan fungsi media. Hanya saja, sejumlah pihak justru mengugat peran media pun. Media dituduh memiliki satu orientasi kepentingan yang sinergis dengan kepentingan teroris, yakni menebar sensasi.

Apalagi seiring dengan semakin canggihya teknologi informasi, di mana media gencar mengembangkan konvergensi. Satu perusahaan media mampu memiliki platform media yang berbeda-beda, baik dalam bentuk cetak, visual, dan digital. Sederhanya dengan beragam platform yang dimiliki oleh satu perusahaan media, pemberitaan atau informasi yang ditayangkan akan beragam, yaitu dalam bentuk teks, gambar, video, digital, dan audio sekaligus. Dengan demikian, pemberitaan media massa terhadap terorisme akan mengalami perubahan pola seiring dengan era konvergensi media.

**PEMBAHASAN**

**Publisitas Terorisme di Media**

Bagi kelompok teroris, publisitas di media sangat penting karena tolok ukur keberhasilan aksi mereka tergantung pada sejauh mana tekanan ketakutan mempengaruhi aspek psikologis masyarakat. Semakin massif pengaruh tekanan tersebut menunjukkan keberhasilan yang dicapai dalam melakukan aksi teror. Bagi Brian Mc Nair, terror merupakan komunikasi politik yang menyimpang dari koridor konstitusional. Para teroris melakukan aksinya untuk mencari publisitas di media agar mendapat simpati public, meruntuhkan moral musuh, mendemonstrasikan kekuatan, menebar ketakutan dan menciptakan prahara (Paletz dalam Mc Nair, 1999: 173).

Kita bisa mengambil contoh berbagi aksi terror yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Setidaknya, pasca tragedy 11 September 2001 di Amerika Serikat, media begitu gencar mempublis dan menayangkan aksi-aksi terror. Runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) diolah sedemikian rupa oleh Amerika untuk melawan dan mengkambing hitamkan teroris. Ironisnya, hal itu justru berdampak lebih luas karena konstruksi yang dilakukan media atas tindakan teror menyebabkan khalayak mulai terjangkiti sindrom islamophobia dengan alasan bahwa para teroris tersebut berasal dari agama Islam.

Di Indonesia sendiri, terorisme sering dihubungkan dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Suatu kelompok yang mengatasnamakan Islam dan melegitimasi aksi kekerasan dengan wilayah operasi di Asia Tenggara. Mereka dituduh oleh pihak kepolisian sebagai dalang di balik sejumlah aksi terorisme, mulai dari tahun 2000 hingga 2005: Bom Bali 1 tahun 2002, Bom Mariot tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004 dan Bom Bali 2 tahun 2005 (Sukawarsini, 2006: 2). Bahkan, sejumlah pihak menuduh mereka memiliki afiliasi dengan kelompok teroris internasional seperti Al-Qaeda, sehingga aksi Bom Bali 1 yang menelan200 korban jiwa adalah aksi terorganisir karena sesuai dengan pola yang digunakan oleh Al-Qaeda.

Namun, dalam perkembangan mutakhir, seiring dengan melemahnya kelompok Al-Qaeda, aksi terror entah yang terjadi di Indonesia ataupun yang terjadi di luar negeri di dalangi oleh kelompok teroris yang berada di bawah komando *Islamic State Iraq and Suriah* (ISIS). Aksi yang mereka lancarkan biasanya terjadi secara berantai dengan intensitas yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari CNN, New York Times dan Esri, sejak tahun 2014 hingga Mei 2017, *Islamic State Iraq and Syriah* (ISIS) mengklaim telah melancarkan 182 serangan langsung dan menginspirasi 46 aksi terorisme di 33 negara di luar Irak dan Suriah. Mereka melakukannya tidak hanya di Eropa dan Amerika, melainkan juga di Asia Tenggara, Australia dan Afrika.

Intensitas aksi terror yang semakin tinggi itu menyebakan daya serap dan publisitas media tentang isu-isu terorisme menjadi semakin naik, apalagi ditambah dengan teknologi-komunikasi yang semakin canggih. Media dan terorisme memang secara eksplisit adalah dua entitas yang saling berlainan. Tetapi, jika ditilik lebih jauh, keduanya memiliki keterjalinan, setidaknya dalam menciptakan tekanan psikologis bagi masyarakat. “*Terrorist attacks are often carefully choreographed* [*to attract the att*](http://www.reuters.com/)*ention of the electronic media and the international press*” (Jenkins in Hoffman 1998, 132).

Manuel R. Torres Soriani dalam tulisannya yang berjudul *Terorism and Mass Media after Al-Qaeda: A Change of Course?* (2008), dengan jelas mengemukakan adanya keterkaitan antara terorisme dengan media. Bagi Soriani, media terutama televisi mengusung format “budaya visual” dalam penyajian beritanya. Ketersediaan dan kekurangan bahan visual menjadi bahan penentu bagi stasiun televisi untuk memilih aspek visual mana yang akan ditayangkan dan yang akan dibuang. Inilah factor yang menyebabkan kelompok teroris merencanakan objek serangan secara matang. Tak heran, jika kemudian teroris memilih tempat atau lokasi yang signifikan untuk diliput dan disiarkan oleh media.

Dengan mengikuti logika seperti itu, maka aksi teror pada 11 September 2001 dalam pandangan Soriani telah cukup secara visual untuk memenuhi budaya televise dan untuk memuaskan public akan liputan langsung peristiwa tersebut. Mengacu pada fakta demikian, kita bisa berpraduga bahwa aksi-aksi terror yang terjadi di kota-kota besar di berbagai negara, salah satu orientasinya ialah publisitas media agar tekanan psikologis berupa kengerian dan ketakutan bisa menghantam khalayak secara luas.

Kasus terorisme yang didalangi oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) adalah contoh kongkretnya. Mereka melakukan serangan secara simultan di berbagai kota besar di sejumlah negara. Mulai dari aksi terorisme di Paris, Prancis (13 November 2015), terror di Brussel, Belgia (22 Maret 2016), terror London, Inggris (22 Maret 2017), teror kampung Melayu, Jakarta (24 Mei 2017), hingga teror bom bunuh diri di Manchester Arena di Inggris (23 Mei 2017). Frekuensi serangan teroris yang kian meningkat menunjukkan betapa drama ketakutan yang dipertontonkan media kepada khalayak menjadi semakin intensif. Kini, masyarakat terus dihantam oleh kengerian dan ketakutan yang ditayangkan oleh media.

Melihat wilayah serangan teroris yang hanya terkonsentrasi di pusat keramaian dan kota-kota besar, secara tidak langsung hal itu telah mengkonfirmasi pandangan Soriano ihwal sasaran teroris yang tertuju pada wilayah, yang cukup secara visual dan dekat dengan pusat-pusat media. Kedekatan dengan pusat media ini tak lain agar aksi terror yang mereka lakukan bisa langsung ditayangkan, sehingga khayalak bisa menontonnya secara *uptodate*.

**Sensasionalisme Berita Teror**

Di Indonesia, misalnya, teror di Sarinah, Jakarta (14 Januari 2016) bisa kita lihat bahwa teroris melancarkan aksinya dengan pertimbangan pola kerja media. Bom tersebut dalam hitungan matematis memang tidak menelan korban jiwa yang begitu banyak ketimbang terror di Paris atau Bom Bali 1. Kendati demikian, terror di Sarinah mendapat simpati, baik secara nasional maupun internasional. Alasannya, tak lain karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ia adalah pusat media, ekonomi, gaya hidup, pemerintahan dan pusat kantor duta besar berbagai negara. Maka, dengan menyerang salah satu sudut dari berbagai pusat tersebut, secara otomatis akan mendapat reaksi dari media dan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menjadi isu global.

Media, terutama televisi, akan berlomba-lomba menampilkan aksi teror dengan sedramatis mungkin, dengan tampilan visual yang spektakuler dan menyentuh sisi emosionalitas khalayak. Oleh sebab itu, dalam sejumlah penelitian disebutkan bahwa tampilan visual tentang kekerasan, kekejaman, dan kebrutalan di dalam tayangan berita akan menyebabkan perasaan takut bagi seseorang yang tidak merasakan dan terpapar langsung aksi tersebut (Slone, 2010: 508-522). Bahkan, yang lebih ironis ialah tatkala terjadi kondisi yang paradoksal, di mana khalayak membayangkan adegan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan realitas yang memang terjadi di lapangan (Ganor, 2005: 239). Hal tersebut terjadi karena berita yang ditampilkan begitu sensasional.

Menurut Iwan Awaluddin Yusuf, ada tiga aspek bahasan mengenai sensasionalisme pemberitaan di media massa. Yakni teknik, proses, dan pola. Sebagiaman dikutip oleh Emka dan Afrisia dari Iwan Waluddin Yusuf bahwa;

“Teknik sensasionalisme adalah cara atau strategi media untuk menampilkan sebuah berita menjadi sensasional. Hal ini dilakukan melalui penggunaan elemen verbal dan visual dengan metode repetisi dan alokasi. Elemen verbal adalah pemakaian unsur bahasa yang sensasional dalam penulisan berita baik pada level kata, frasa, klausa dan kalimat pada judul, subjudul, lead, dan isi berita. Sedangkan elemen visual terlihat dari penggunaan foto, ilustrasi, dan tabel, termasuk penggunaan warna tertentu dan ukuran penulisan judul yang dibuat besar dan mencolok. Metode repetisi adalah pengulangan atau peningkatan frekuensi kemunculan unsur-unsur sensasionalisme dalam berita. Sementara metode alokasi adalah penyediaan tambahan waktu atau space guna menampilkan atau memberi penekanan pada unsur-unsur sensasionalisme dalam berita.

Aspek kedua dalam bahasan mengenai sensasionalisme pemberitaan adalah proses. Yakni dinamika yang terjadi di ruang redaksi saat memformulasikan sebuah berita sensasional. Proses produksi berita melibatkan unsur-unsur redaksional yang kompleks, seperti peran reporter, redaktur, dll. Proses ini dapat dilihat dengan menggunakan teori konstruksi berita sebagai representasi realitas. Aspek ketiga adalah pola. Yakni kecenderungan bentuk-bentuk pemberitaan sensasional dalam kurun waktu tertentu yang muncul sebagai akibat dari teknik dan proses yang dijalankan secara rutin oleh media dan hasilnya tampak dalam pemberitaan. Pola sensasionalisme koran kuning juga dilakukan melalui penggunaan bahasa dan dramatisasi berita. Dramatisasi dipahami sebagai bentuk penyajian berita yang bersifat hiperbolik atau berlebihan dengan maksud menimbulkan efek dramatis bagi pembacanya. (McQuail, 1992)”.

Frekuensi aksi terorisme yang kian meningkat menimbulkan efek ketakutan yang sifatnya kontinu. Terpeliharanya ketakutan inilah yang sebenarnya menjadi orientasi politis dari kelompok teroris. Bahkan, dari saking parahnya, media seringkali mengabaikan aspek moralitas dan prinsip etis dalam jurnalisme. Eskploitasi atas peristiwa teror yang dilakukan oleh media, secara tidak langsung telah memberi keuntungan bagi kelompok teroris. Di titik ini, kita bisa memahami bahwa di balik itu semua sebenarnya ada keterjalinan yang sama-sama menguntungkan. Bagi industri media, keuntungan tersebut didulang dari banyaknya khalayak yang menonton atau membaca berita yang ditayangkan. Sementara, bagi kelompok teroris, kuntungan tersebut didapat persebaran ketakutan yang sifatnya holistik.

Di Indonesia contohnya, stasiun televisi TV One pernah menayangkan penyerbuan Temanggung hampir 24 jam (2000), atau ANTV yang pernah menampilkan aksi tembak-menembak antara polisi dengan kelompok teroris yang berada di bawah komando Azhari di Malang (2005). Kedua liputan ini memunculkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, kita bisa menemukan benang merah, bahwa televisi seringkali lebih mengutamakan sensasionalisme dan kebombastisan ketimbang nilai etis jurnalistik dalam meliput kasus terorisme (Imaduddin, 2016).

*“The media are the terrorist’s best friends, the terrorist’s act by itself is nothing, publicity is all”*(Laquer 2004). Ini artinya media telah menjadi kawan akrab bagi teroris. Kehadiran media dalam setiap aksi teror kian menegaskan bahwa teroris tidak perlu melancarkan serangan dalam skala besar. Mereka cukup melancarkan serangan di wilayah yang dianggap vital dalam suatu negara, dan dengan hal itu media akan meliputnya sehingga orang-orang sekitar pun ikut terpapar ketakutan yang disebabkan oleh aksi teror tersebut, meskipun skala serangannya kecil.

Adanya hubungan simbiosis mutualisme antara media dan terorisme menunjukkan tergadainya prinsip jurnalisme, sehingga membuat Paul Johnson—sebagaimana dikutip Behm (1991, 240) merasa geram *“Most jounalists are scoundrels. They can’t tell the difference between hard news and scandal, exept that like scandal because it make money. They should all be locked up”*. Terjalinnya hubungan media dan teroris juga ditegaskan oleh Giessmann (2002: 134-136). Menurutnya, para teroris membutuhkan media sebagai panggung untuk mencari sensasi agar masyarakat termakan propaganda mereka. Pada tahap selanjutnya, foto atau video dari setiap detail peristiwa teror akan dipilah dan dipilih oleh media sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan dari hal tersebut ialah agar ada kejutan dari berita yang disajikan serta menjadi *leading newspaper* bagi sejumlah saingannya.

Padahal, idelanya media seharusnya mampu menjaga integritasnya. Objektivitas adalah tolok ukur yang mesti dikedepankan dalam setiap peliputan berita. Oleh sebab itu, dalam setiap berita tentang terorisme media semestinya berani untuk bertanggungjawab (Chaudhary, 2002: 158-164). Untuk itu, keakuratan fakta dan keontentikannya merupakan dasar dari setiap peliputan berita terkait terorisme agar bisa memenuhi kepentingan publik.

**Publisitas Terorisme di Era Konvergensi TV One**

Adalah Kalodzy, Janet, Grant, August E., De Mars. Tony R., Wilkinson, Jeffrey S (2014) dalam artikelnya *The Convergence Years* yang memberikan gambaran menarik tentang terbukanya pintu konvergensi media hari ini. Konvergensi media akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat menarik. Ada berbagai pihak yang psimis dan optimis dalam menghadapi dampak yang akan dihasilkan dari konvergensi media.

Kehadiran internet dengan berbagai fitur yang ditawarkan, seperti media sosial membuat media harus mampu melakukan adaptasi. Jika adaptasi dengan teknologi komunikasi mutakhir tersebut gagal dilakukan, media akan mengalami kemerosoton. Di Amerika Serikat media cetak seperti The Rocky Mountains dan The Seattle Post Inttelegence terpaksa harus gulung tikar karena kegagalannya berdaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi baru. Di Indonesia kasus serupa terjadi pada media cetak Sinar Harapan, Harian Bola dan Jakarta Globe.

Dalam pandangan Terry Flew adalah hasil dari tiga elemen *new media*; jaringan komunikasi, teknologi-komunikasi, dan konten media. Di samping itu, konvergensi media meniscayakan adanya penggabungan berbagai layanan informasi menjadi satu wadah. Dalam artian, industri media menggunakan berbagai *platform* dalam menyajikan berita, namun meski demikian, seluruh *platform* tersebut masih di dalam satu payung perusahaan yang sama.

Dalam upaya melakukan konvergensi ini, Grant (2009: 33) menawarkan tiga metode jurnalistik yang bisa dilakukan. Pertama, konvergensi *newsroom*. Dalam konvergensi ini, jurnalis dari berbagai *platform* (televisi, radio, koran dan online) menyatukan dirinya dalam satu ruang kerja. Kedua, konvergensi *newsgathering,* yakni konvergensi yang menuntut adanya kemampuan multidimensional *(multitasking)* dari seorang jurnalis. Para jurnalis dalam hal ini harus mampu menyajikan berita di berbagai *platform*, sehingga dia tidak hanya bisa mendeskripsikan berita di koran, melainkan juga mampu menyajikannya dalam bentuk audiovisual. Ketiga, konvergensi *content* yaitu dengan menyajikan berita dalam bentuk multimedia. Kreatifitas dan inovasi dalam bidang teknologi-komunikasi yang terus meningkat, memungkinkan dalam satu website, berita bisa disajikan dalam bentuk teks, foto, audio dan visual sekaligus.

Di era konvergensi media seperti saat ini, ketakutan akibat terorisme direproduksi tidak hanya dalam satu *platform*, melainkan di berbagai *platform*. Khalayak diberi hak untuk memilih saluran berita yang disukainya, entah melalui tulisan, gambar, video atau audio. Bahkan, media mampu menyajikan teks, foto, video dan audio dalam satu tayangan berita sekaligus. Namun, yang perlu di garis bawahi ialah bahwa konvergensi yang demikian bisa terlaksana lantara adanya saluran internet. Di samping itu, konvergensi bisa tercapai karena dukungan modal yang kuat.

Dengan demikian, konglomerasi secara tidak langsung turut menciptakan konvergensi media. Ada kemungkinan satu perusahaan menaungi berabagai media. Dalam konteks ini, ialah Visi Media Asia yang menaungiTV One, ANTV dan Viva.co.id. Sebagaimana informasi yang disebut dalam <https://www.vivagroup.co.id> bahwa PT Visi Media Asia didirakn pada tahun 2004. Ia adalah perusahan yang mengusung konvergensi media terintegrasi di Indonesia dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2011. Dalam portal itu disebutkan bahwa:

“Sejak saat tahun 2011, VIVA telah memantapkan dirinya sebagai inovator yang konsisten dalam sektor dengan fokus strategis pada penargetan mikro, sinergi dan interaksi pemirsa. Kegiatan Perusahaan mencakup stasiun TV Free to Air (FTA) dan portal digital yang berkembang pesat, didukung oleh media sosial dan kegiatan di luar udara untuk jangkauan yang komprehensif di semua saluran. Melalui strategi konvergensi 360˚ dan inovasi berkelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan, pemirsa dapat mengakses konten inovatif dan menarik melalui FTA TV, aplikasi seluler, dan streaming online. Selain itu, VIVA juga memanfaatkan media sosial, termasuk Twitter, Facebook, Instagram dan Google+ untuk mendapatkan umpan balik dari pemirsa setia. VIVA telah berhasil mempertahankan peringkat Tier 1 untuk stasiun TV FTA ANTV dan tvOne sebagai stasiun berita # 1, sementara jumlah pengguna setia portal digital viva.co.id. telah meningkat, memposisikan VIVA untuk mempercepat pertumbuhan melalui konvergensi.

TV One dan viva.co.id adalah dua media dengan platform yang berbeda, yang berada di bawah naungan Visi Media Ais. Meskipun di antara media tersebut memiliki titik perbedaan dalam menyajikan berita, tetapi dengan konvergensi, masyarakat atau khalayak diberi kebebasan untuk memilih saluran berita dengan paltform yang berbeda-beda. Maka, dengan demikian aksi terorisme di era konvergensi media akan disajikan dengan berbagai berita yang berbeda-beda oleh industri media itu sendiri.

Dalam tayanganya tentang aksi terorisme di Paris (13 November 2015) misalnya, TV One menampilkan video rekaman CCTV yang ditayangkan oleh Daily Mail dengan tajuk “Rekaman Penyerangan 13 November 2016”. Di dalam rekaman tersebut, khalayak diajak untuk menonton bagian atau penggalan video CCTV yang menampilkan aksi teroris dalam melakukan serangan terhadap bar Le Carillon di Paris. Para teroris melakukan penambakan dari luar bar dan hal itu membuat kepanikan serta ketakutan bagi semua orang yang ada di dalam bar. Sehingga, terlihat jelas dalam rekaman bagaimana orang-orang yang ada di dalam bar lari ketakutan, dan mencari tempat berlindung. Ada yang terlihat merunduk dan berlindung di bawah meja, ada juga yang mencari tangga untuk keluar dari bar.

Sementara, viva.co.id menyajikan berita dalam bentuk teks dan gambar. Terkait teror Paris, viva.co.id sempat menurunkan berita bertajuk *Teror Berdarah Paris, Peringatan bagi Dunia* (16 November 2015). Dalam berita tersebut disebutkan bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) melakukan tindakan teror sebagai reaksi atas serangan udara Prancis atas Suriah. Mereka juga mengancam Prancis sebagai sasaran dan target utama aksi mereka. Reproduksi ketakutan menjadi kian gamblang tatkala viva.co.id mengutip pernyataan ISIS yang diperoleh dari Express.co.uk “Kami mengirim mereka (pelaku) dengan dibekali rompi peledak dan membawa senjata untuk melakukan serangan,”

Dampak ketakutan akan aksi teror di Paris terkonfirmasi dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menemukan sekitar 84,62 responden menyatakan khawatir akan terjadi aksi seperti di Paris. Sedangkan hanya 13, 19 persen warga yang tidak khawatir dan 2, 19 persen warga tidak takut. Rata-rata mereka yang dicekam ketakutan berdomisili di wilayah perkotaan. Menurut temuan LSI, kekhawatiran masyarakat dipicu oleh pemberitaan media yang sering mengemukakan bahwa sel-sel jaringan ISIS telah ada di Indonesia. Ditemukannya fakta itu kian menunjukkan betapa media berpengaruh sangat besar dalam memainkan psikologis khalayak, terutama untuk menciptakan ketakutan dalam diri mereka.

Sementara itu, dalam aksi terorisme di Jalan MH. Thamrin, Sarinah, Jakarta pada 14 Januari 2016, TV One bersama dengan viva.co.id memuat berita yang tidak jelas sumbernya. Berita tersebut ditampilkan dalam program “Breaking News” yang mengabarkan bahwa terjadi ledakan di tiga tempat selain di Sarinah, yakni di Slipi Jakarta Barat, Kuningan Jakarta Selatan dan Cikini Jakarta Pusat. Berita tersebut simpang siur dan tidak ada verifikasi terlebih dahulu dari pihak TV One. Meskipun pada akhirnya mereka melakukan koreksi terhadap pemberitaan tesebut, namun masyarakat dibuat resah dan takut dengan adanya pemberitaan yang tidak jelas tersebut.

Di samping itu, media daring yang berada di bawah naungan Visi Media Indonesia yaitu viva.co.id pun memuat berita yang sama, dengan menyebut terjadi tiga ledakan di tiga lokasi di Jakarta. Ini artinya, jika dilihat secara eksternal, TV One dan Viva.co.id telah melakukan konvergensi konten, di mana satu berita diformulasi dalam berbagai *platform* yakni visual dan online. Pemberitaan terkesan hanya mengejar untuk terus *update.*

Di bawah ini merupakan berita yang diinformasikan oleh Viva.co.id. Di dalam berita tersebut, tersedia link yang manyambungkan secara online untuk melihat video Breaking News TV One yang menyatakan bahwa telah terjadi ledakan di tiga lokasi di Jakarta:

**VIVA.co.id –** Ledakan beruntun terjadi di kawasan sekitar Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Januari 2016. Dari foto yang beredar, sedikitnya ada 3 orang tewas akibat insiden mengerikan tersebut.

Usai kejadian tersebut, ratusan aparat kepolisian segera mengepung lokasi kejadian. Mereka mengejar salah satu pelaku yang dikabarkan bersembunyi di Gedung Jakarta Teater.

Dalam video yang berhasil diperoleh tvOne, terlihat bom pertama meledak di depan Gedung Strarbucks diiringi oleh kepulan asap. Orang-orang di sekitar itu tampak berlarian.

Tak berhenti di sana, teror kembali berlanjut. Beberapa detik kemudian terjadi ledakan kedua.

Sejumkah saksi mengatakan bahwa ledakan di kawasan Thamrin terjadi sebanyak lima atau enam kali. Namun, lebih mencengangkan, dilaporkan ledakan tidak hanya terjadi satu tempat tersebut. Diduga ada lagi ledakan di 3 lokasi, yaitu kawasan Slipi, Kuningan dan Cikini. (ase)



(Sumber Foto: Youtube)

Menurur Wardlaw (1982: 77), pemberitaan media atas terorisme memiliki delapan konsekuensi di antarnya ialah: 1). Liputan media hanya menjadi wahana untuk menunjukkan dirinya dengan melakukan aksi kekerasan demi merendahkan otoritas negara; 2) laporan mengenai peristiwa terorisme dapat memicu dan memencing terjadinya aksi serupa; 3) laporan terkait kejadian teror yang belangsung dapat menghambat pengamanan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dan membahyakan nyawa sandera. 4). Leporan tentang aksi teror yang sedang berlangsung membuat pemerintah tertekan dan membatasinya dalam mengambil keputusan. 5). Laporan media tentang terorisme justru bisa kian menegaskan kekuatan kelompok teroris. 6). Laporan detail detail yang berlebihan dari kelompok teroris maupun operasi pemberantasan teroris menyediakan informasi taktik dan strategi yang menyebabkan upaya penyelesaian kasus teroris makin sulit ke depannya. 7). Kompetisi antar media dalam mengambil berita dapat memunculkan penekanan pada sisi sensasional dan kekerasan dari peristiwa terorisme itu sendiri. 8). Liputan secara instan tentang terorisme terkadang dapat memunculkan sisi subjektif reporter karena ia menjadi partisipan dalam peritiwa tersebut (Simarmata, 2014: 43).

Pada kasus pemberitaan TV One dan Viva.co.id terkait dengan aksi terorisme di Sarinah jika ditilik lebih jauh baragkali didasari karena kompetisi antar media. Konvergensi media yang didorong oleh internet ternyata membuat sejumlah media justru kian mengabaikan prinsip etis jurnalisme dalam pemberitaan terorisme. Padahal, informasi yang salah dn bias akan merugikan masyarakat. Berita yang tidak diolah secara valid oleh TV One dan Viva.co.id hanya akan menciptakan bias dan merugikan masyarakat.

Dalam meliput peristiwa kekerasan, pola pemberitaan media bertumpu pada upaya untuk mengeksplorasi pelaku dan korban. (Shah & Thornton, 2004). Sementara itu, dalam pemberitaan tentang terorisme, pemberitaan di media terbagi menjadi dua yaitu *victim mode reporting* dan *devensive mode reporting* (Wolfsfeld, Frosh & Awabdy, 2008).

Pemberitaan korban diterapkan ketika dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Namun, belakangan meskipun korbannya adalah aparat kepolisian, media tetap menjadikannya sebagai objek berita. Sedangkan, pola pemberitaan divensif *(defensive mode reporting)* diterapkan pada situasi di mana pemimpin yang dipandang bertanggung jawab dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kaitannya dengan korban di kalangan sipil. Sebagimana dikatakan oleh Simarmata (2014: 44) bahwa:

“Pada model pemberitaan korban, media cenderung untuk meningkatkan aspek emosional dari peristiwa, kemudian akan muncul penekanan aspek-aspek etnosentrisme dari media tersebut atau di mana media itu berada. Peningkatan aspek emosional dalam pemberitaan kasus terorisme tentu sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Selain dapat mengaburkan peristiwa yang sebenarnya, hal tersebut juga bisa memicu kekecewaan, atau ketakutan di masyarakat. Padahal peran media dalam situasi seperti itu diharapkan dapat menjadi pemberi informasi agar masyarakat merasa tenang”.

Celakanya, TV One dan Viva.co.id justru melansir berita bohong *(hoax).* Penyebaran berita *hoax* pada periode seperti itu membuat para pengguna internet atau biasa disebut sebagai netizen sangatlah khawatir, apalagi jika menyangkut dengan isu terorisme. Dari kasus inilah, sahrusnya awak media harus memerhatikan dan menverifikasi berita sebelum disampaikan kepada khalayak.

Direktur *Institute for Criminal Justice Reform* Anggara Suwahju bahkan menakankan bahwa akurasi dalam berita tidak hanya melulu pada media online. Menurutnya, masalah akurasi juga kerap terjadi pada media cetak atau televisi. Jadi, tegasnya, setiap media hingga saat ini memang terus bergumul dengan persoalan akurasi. Menelisik diskusi di atas mengenai akurasi dan kecepatan, baik jika kita melongok sebentar pandangan Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam “Sembilan Elemen Jurnalisme”. Mereka menyatakan, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. “Prinsip pertama jurnalisme ini yaitu pengejaran akan kebenaran yang tidak berat sebelah adalah yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain,” papar Kovch dan Rosenstiel.

Selanjutnya, Kovach dan Rosenstiel (2003) menuturkan:

“Demi mengejar kebenaran itu, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Era teknologi tinggi saat ini membawa jurnalisme menyerupai percakapan54, sangat mirip dengan jurnalisme pertama yang berlangsung di kedai minum dan kafe 400 tahun lalu. “Fungsi jurnalisme tidak berubah secara mendasar meski kita telah memasuki era digital. Teknik yang digunakan mungkin berlainan, tapi prinsip-prinsip yang menggarisbawahinya tetap sama. Yang pertama dilakukan wartawan adalah verifikasi”

Berdasarkan pernyataan tersebut, verifikasi dalam berita online, televisi dan lain sebagainya di era konvergensi menjadi begit signifikan. Apalagi jika menyangkut dengan peristiwa terorisme, karena jika berita yang disampaikan berisi kebongan, maka masyarakat yang akan terdampak imbasnya. Kondisi akan menjadi begitu mencekam dan masyarakat akan mengalami ketakutan yang luar biasa karena terorisme adalah aksi brutal yang dapat mengancam nyawa seseorang.

**PENUTUP**

Aksi teror yang akhir-akhir ini semakin intensif dilancarkan oleh kelompok-kelompok teroris perlu disikapi dengan bijaksana oleh media. Setidaknya dengan mempertimbangkan dampak yang harus ditanggung oleh khalayak. Apalagi di tengah perkembangan teknologi-komunikasi, di mana media sosial dngan berbagai gendre dan tipenya bisa kita akses. Sehingga memungkinkan aksi teror disebarkan melalui media sosial, sehingga masyarakat terkonstruk oleh perasaan khawatir, cemas dan takut.

Media di era konvergensi seperti sekarang sangat urgen perannya, terutama untuk membingkai berita dan isu yang berkembang tentang terorisme. Jika mau ideal, seharusnya awak media mampu memutus keterkaitan atau simbiosis dengan kelompok teroris. Setidaknya, propaganda yang disebarkan kelompok teroris berhasil diminimalisir agar masyarakat tidak dihantui oleh ketakutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Behm, A.J. (1991). ‘Terorism: Violance Against the Public and the Media: The Australian Appoarch’. *Political Communication and Persuassion.* Vol. 8*.*

Chaudhary, Anju Grover. (2002). ‘The Media’s Responsibility in Reporting Terorism’. *Media Asia Communication Quertely.* Vol. 20 No. 3.

Ganor, Boaz. (2005). *The Counter Terrorism Puzzle. A Guide for Decision Makers*. New York: Continuum.

Djelantik, Sukawarsini. (2006). ‘Terorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese Terrorist’. *International Graduate Studen Conference Series No. 22, East-West-Center.*

Giessmann, Hans J.(2002). ‘Media and the Public Sphere: Catalyst and Multiplier of Terorism?’. *Media Asia Communication Quertely.* Vol. 20 No. 3

Grant, August E. & JS. Wilkinson. (2009). *Understanding Media Convergence: The State of the Field.* New York: Oxford University.

Hoffman, Bruce. (1998). *Inside Terorism*. New York: Columbia University Press.

Imanuddin, Firman. (2016). ‘Simbiosis Media dan Terorisme’ dalam *remotivi.or.id*.

Jainuri, A. ‘Terorisme dalam Wacana Kontemporer Islam: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi’. *Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel , Surabaya. 12-9-2006*.

Kovach, Bill., & Rosenstiel, Tom. (2003). *Sembilan Elemen Jurnalisme, Jakarta*: Pantau.

McNair, Brian. (1999). *An Introduction to Political Communication.* London: Routladge.

McQuail, Denis. (2002). *McQuail’s Reader in Mass Communication Theory*. London: Sage Publication Ltd.

Nacos, Brigitte L. (2002). Mass-Mediated Terrorism. USA: Rowman and Littlefield.

Prajarto, Nunung. (2004). ‘Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media’. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik.* Vol. 8 No. 1.

Slone, Michelle. (2000). ‘Responses to Media Coverage of Terrorism’. *Journal of Conflict Resolution*.

Salvatore, Simarmata. (2013). ‘Menegakkan Jurnalisme Etis dalam Pemberitaan Kasus Terorisme‘. *Interact, Vol. 2, No. 2.*

Soriano, Manuel R. Torres. (2008). ‘Terorism and Mass Media after Al-Qaeda: A Change of Course?’. *Athena Intelligence Journal Vol.3, No 2.*

Wardlaw, Grant. (1982). *Political Terrorism: Theory, Tactics, and Counter-Measures*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wolfsfeld, G., Frosh, P., & Awabdy, M. (2008). Covering Death in Conflicts: Coverage of the Second Intifada on Israeli and Palestinian. *Journal of Peace Research Vol. 45 no 3.*